



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**



**RENJA PERUBAHAN 2024**

Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru - Kalimantan Selatan

Kode Pos 70711

<https://bkpsdm.banjarbarukota.go.id> instagram @bkpsdm.bjb

email : [bkpsdm@banjarbarukota.go.id](mailto:bkpsdm@banjarbarukota.go.id)





# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



WE  
SERVE  
WITH  
HEART

# BKPSDM

Banjarbaru

ALAMAT KANTOR : JL. PANGLIMA BATUR NO.1 TELP/FAX. (0511) 4772495 BANJARBARU  
KALIMANTAN SELATAN

WEBSITE : [www.bkpp.banjarbaru.kota.go.id](http://www.bkpp.banjarbaru.kota.go.id) EMAIL : [layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id](mailto:layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Perubahan 2024

Rencana kerja perubahan tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja perubahan tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru selama tahun 2024.

Dalam urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kompetensi Pegawai.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Oktober 2024  
Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan

Dr. H. GUSTAFA YANDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Dan Capaian Renstra SKPD Triwulan II.....	7
2.2 Analisis Kinerja Palayanan SKPD.....	43
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III    KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN.....	56
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarbaru.....	56
BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	57
4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	57
4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	57
4.3 Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	58
BAB V    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA.....	61
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	61
BAB VI    PENUTUP.....	73
LAMPIRAN.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023.....	8
Tabel 2.2	Formulir E.81 Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Tahun 2024.....	9
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra .....	32
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024.....	48
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran (Perubahan).....	58
Tabel 5.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026.....	62
Tabel 5.2	Penambahan Anggaran Tahun 2024.....	69
Tabel 5.3	Pergeseran Anggaran Tahun 2024.....	72
	LAMPIRAN.....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang bersumber dana APBD Kota Banjarbaru. Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran yang hendak dicapai serta prioritas yang hendak ditempuh dengan mengacu pada program dan kegiatan yang perlu diselesaikan pada tahun 2024.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, Renja PD menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya,

yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Perubahan Perangkat Daerah. RKA perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Perangkat Daerah. Renja SKPD juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Renja Perubahan maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2025 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) ;
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
  19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

## 1.3 Maksud Dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru adalah :

- a. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stackholders*) tentang rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Menjadi kerangka acuan bagi SKPD dalam upaya meningkatkan kualitas kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat/ menjelaskan tentang maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang kerangka ekonomi daerah

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

### **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat kebijakan ekonomi dan keuangan daerah

### **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat tujuan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD, memuat tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah..

### **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat kegiatan lanjutan sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan serta proyeksi pendanaan daerah

### **BAB VI. PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kabutuhan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERNGKAT DAERAH**  
**TRIWULAN II TAHUN 2024**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD Triwulan II**

Rencana Kerja Perubahan merupakan Penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar berupa penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dalam pelaksanaan APBD.

Sedangkan kinerja sebagai keluaran dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukur kinerja itu sendiri memerlukan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan atau program/kegiatan juga merupakan alat ukur yang sah dalam mengevaluasi serta menilai kinerja.

Kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Penggunaan input untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, besarnya output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian besaran nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung karena output merupakan hasil langsung dari kegiatan. Akan tetapi sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan waktu beberapa tahun penelitian/penilaian.

Evaluasi Renja tahun sebelumnya dijadikan dasar penyusunan Renja tahun 2023, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru. Evaluasi Renja tahun sebelumnya dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan anggaran. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, menurut kategori urusan penunjang bukan pelayanan dasar. Target kinerja yang dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dari evaluasi Pelaksanaan Renja tahun berjalan antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja

pembangunan daerah.

3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Evaluasi pelaksanaan masih mengacu pada Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru melaksanakan 3 (*tiga*) program dengan 13 (*tiga belas*) kegiatan dan 43 (*empat puluh tiga*) sub kegiatan, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 rincian belanja pegawai sebesar Rp 5.303.606.940,- belanja barang dan jasa Rp.10.649.054.790,- serta belanja modal Rp.1.604.167.000,- Total Belanja daerah untuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Rp. 17.556.828.730,-

Capaian target indikator kinerja untuk tahun 2023 yang disajikan pada tabel 2.1 dan realisasi keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru pada tabel 2.2 :

Tabel 2.1  
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA SASARAN BADAN  
KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN</b>	Indeks Sistem Merit	260	265	101,2%
2	<b>Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	32,32 %	35,31 %	109,25 %



Tabel 2.2  
Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru  
Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru  
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

NO	Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12	14 = 13/5x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	5.917.880.066	A	4.848.841.828	BB	5.917.880.066	24,22	1.433.095.669	34,93	2.066.832.930				59,14	3.499.928.599				
1	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	218.607.000	97 %	94.880.000	100 %	218.607.000	16,36	35.764.350	25,69	56.161.000				42,05	91.925.350				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29.453.250	7 dok	31.669.750	6 Dokumen	29.453.250	3 Dokumen	3.189.350	1 dok	6.272.000				4 Dokumen	9.461.350				

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap ora n	189.1 53.75 0	1 la p	63.21 0.250	2 Lap ora n	189.1 53.75 0	-	32.57 5.000	-	49.88 9.000					-	82.46 4.000				
2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>5.671.129.666</b>	<b>90 %</b>	<b>4.742.404.932</b>	<b>100 %</b>	<b>5.671.129.666</b>	<b>24,64</b>	<b>1.397.331.319</b>	<b>42,40</b>	<b>2.010.671.930</b>					<b>67,04</b>	<b>3.408.003.249</b>				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	53 orang	5.643.243.916	53 orang	4.709.539.632	53 orang	5.643.243.916	56 orang	1.394.475.819	56 org	2.001.842.930					56, orang	3.396.318.749				

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.768.750	1 laporan	9.748.500	1 Laporan	9.768.750	-	484.500	-	3.628.000					-	4.112.500				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan	8 Laporan	18.117.000	8 laporan	23.116.800	8 Laporan	18.117.000	2 Laporan	2.371.000	2 Laporan	5.201.000					4 Laporan	7.572.000				
3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan BMD SKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>28143400</b>	<b>88 %</b>	<b>11.556.896</b>	<b>100 %</b>	<b>28.143.400</b>	-	-	-	-					-	-				

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5 Laporan	28143400	5 laporan	11.556.896	4	28.143.400	-	-	-	-								
4	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.487.734.680</b>	<b>100%</b>	<b>2.493.105.089</b>	<b>100%</b>	<b>1.487.734.680</b>	<b>19,88</b>	<b>295.700.692</b>	<b>12,02</b>	<b>299.704.756</b>				<b>31,90</b>	<b>595.405.448</b>			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>859.162.700</b>	<b>100%</b>	<b>976.410.156</b>	<b>100%</b>	<b>859.162.700</b>	<b>29,13</b>	<b>250.250.264</b>	<b>26,52</b>	<b>258.978.148</b>				<b>55,65</b>	<b>509.228.412</b>			



		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	35.823.000	3 paket	35.822.500	3 Paket	35.823.000	1 Paket	9.967.000	1 Paket	1.317.000					1 Paket	11.284.000				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	255.900.000	8 paket	241.109.500	8 Paket	255.900.000	4 Paket	41.370.000	4 Paket	69.784.200					4 Paket	111.154.200				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	65.441.700	2 paket	65.000.000	2 Paket	65.441.700	-	-	-	61.172.500					-	61.172.500				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	1.998.000	2 dok	1.998.000	4 Dokumen	1.998.000	-	-	4 dok	999.000					-	999.000				

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	500.000.000	4 laporan	597.480.156	4 laporan	500.000.000	1 laporan	198.913.264	1 laporan	125.705.448					1 laporan	324.618.712				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen pentaan arsip dinamis pada SKPD	1 dok		1 dok	35.000.000	4 laporan	500.000.000		-		-						-				
5		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dapat Digunakan</b>	<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dapat Digunakan</b>	<b>100 %</b>	<b>208.909.180</b>	<b>100 %</b>	<b>1.104.030.000</b>	<b>100 %</b>	<b>208.909.180</b>	-	-	-	-					-	-				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 unit	468.700.000						-						-				

		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	62.45 6.800	2 5 u nit	202.5 70.00 0	5 Unit	62.45 6.800	-	-	-	-				-	-				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	77.51. 5900	5 u nit	167.2 60.00 0	5 Unit	77.51 5.900	-	-	-	-				-	-				
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 p a k e t	197.0 00.00 0															
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	68.93 6.480	1 0 u nit	68.50 0.000	10 Unit	68.93 6.480	-	-	-	-				-	-				

6		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>168.262.800</b>	<b>100 %</b>	<b>135.977.433</b>	<b>100 %</b>	<b>168.262.800</b>	<b>15,20</b>	<b>25.572.148</b>	<b>22,69</b>	<b>30.859.563</b>			<b>37,89</b>	<b>56.431.711</b>				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	13.922.993	12 Laporan	15.000.000	3 Laporan	2.334.892	3 laporan	1.168.059			3 Laporan	3.502.951				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	153.262.800	4 laporan	122.054.440	4 Laporan	153.262.800	1 Laporan	23.237.256	1 laporan	29.691.504			1 Laporan	52.928.760				

7		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>251.400.000</b>	<b>1</b>	<b>276.687.500</b>	<b>100 %</b>	<b>251.400.000</b>	<b>7,91</b>	<b>19.878.280</b>	<b>3,57</b>	<b>9.867.045</b>				<b>11,47</b>	<b>29.745.325</b>				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	76.000.000	1 unit	38.000.000	2 unit	76.000.000	2 Unit	9.200.040	2 unit	4.500.000				2 Unit	13.700.040				



		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	18 Unit	113.400.000	18 unit	106.742.500	18 Unit	113.400.000	18 Unit	10.678.240	18 Unit	5.367.045					18 Unit	16.045.285				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20 Unit	4.000.000	20 unit	4.000.000	20 Unit	4.000.000	-	-		-					-	-				
		Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit	40.000.000	1 unit	20.000.000	1 Unit	40.000.000	-	-		-					-	-				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir rehabilitasi	1 unit		1 unit	89.945.000						-						-				

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	54 Unit	18.000.000	36 unit	18.000.000	54 Unit	18.000.000	-						13 Unit	-				
8	MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	NDEKS SISTEM MERIT	265	5.307.908.200	260	4.490.311.002	265	5.307.908.200	16,51	876.107.400	15,17	681.263.500			31,68	1.557.370.900				
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Data Terupdate Pada Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	100%	1.687.741.150	100%	1.573.331.685	100%	1.687.741.150	2,11	35.651.500	21,21	333.729.500			23,32	369.381.000				

		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	2 Dokumen	82.83 5.400	2 dok	80.13 5.400	2 Dokumen	82.83 5.400	-	-	-	33.50 0.000					-	33.50 0.000				
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	681.7 55.000	1 dok	717.2 75.085	2 Dokumen	681.7 55.000	-	14.00 0.000	-	188.1 00.000					-	202.1 00.000				
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	137 SK	107.8 01.050	1 4 6 SK	154.4 32.900	137 SK	107.8 01.050	35 SK	5.760 .000	38 SK	15.49 0.000					72 SK	21.25 0.000				

		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	32 lembaga	407.399.100	32 Lembaga	379.691.500	32 lembaga	407.399.100	32 lembaga	15.891.500	32 lembaga	39.139.500					32 lembaga	55.031.000				
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	12 Dokumen	201.199.500	12 Dokumen	241.796.800	12 Dokumen	201.199.500	3 Dokumen	-	3 Dokumen	57.500.000					3 Dokumen	57.500.000				
9		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan lowong yang terisi sesuai ketentuan	100%	2.497.002.700	100%	1.684.847.467	100%	2.497.002.700	25,48	636.259.150	12,11	302.414.900					37,59	938.674.050				
			Persentase pangkat dalam jabatan yang terisi sesuai ketentuan	100%								100%		25,48	12,11	37,59	-						
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	259.587.000	22 Dokumen	204.127.167	6 Dokumen	259.587.000	1 Dokumen	47.700.000	22 Dokumen	79.830.000					3 Dokumen	127.530.000				

		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	10 Dokumen	2.237.415.700	10 Dokumen	1.480.720.300	10 Dokumen	2.237.415.700	2 Dokumen	588.559.150	3 Dokumen	222.584.900					5 Dokumen	811.144.050				
10		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensinya</b>	<b>100 %</b>	<b>845.817.500</b>		<b>579.626.250</b>	<b>100 %</b>	<b>845.817.500</b>	<b>20,01</b>	<b>169.253.000</b>	<b>0,35</b>	<b>2.936.500</b>					<b>20,36</b>	<b>172.189.500</b>				
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	60 Orang	740.520.500	26 Orang	480.394.500	60 Orang	740.520.500	50 orang	139.300.000		2.936.500					50 orang	142.236.500				
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	10 Orang	44.698.000	10 Orang	41.998.750	10 Orang	44.698.000	-	-							-	-				
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	20 Orang	60.599.000	20 Orang	57.233.000	20 Orang	60.599.000	48 orang	29.953.000							48 orang	29.953.000				

11		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur Yang Berkinerja Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>484.097.950</b>		<b>652.505.600</b>	<b>100 %</b>	<b>484.097.950</b>	<b>7,22</b>	<b>34.943.750</b>	<b>8,71</b>	<b>42.182.600</b>				<b>15,93</b>	<b>77.126.350</b>				
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasilpenilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Laporan	244.699.800	2 laporan	422.122.800	2 Laporan	244.699.800	4 Laporan	18.332.000	3 Laporan	17.527.800				7 Laporan	35.859.800				
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	3 Orang	59.999.900	2 orang	38.049.900	3 Orang	59.999.900	-	-	-	1.988.800				-	1.988.800				
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa apartu	1 Dokumen	73.798.750	1 dok	63.699.000	1 Dokumen	73.798.750	-	12.611.750	-	4.800.000				-	17.411.750				

		Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	20 Orang	70.000.000	20 Orang	78.364.000	20 Orang	70.000.000	7 Orang	4.000.000	5 Orang	12.186.000					12 Orang	16.186.000				
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 Laporan	45.600.000	4 Laporan	40.270.000	1 Laporan	45.600.000	-	-	-	5.680.000					-	5.680.000				
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai yang dilayani	1 Dokumen	9.999.600	1 dok	9.999.900	4	9.999.600	1 Dok	-	1 Dok	-					-	-				

12	MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM APARATUR PEMERINTAH KOTA BANJARBARU	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	Persentase SDM Aparatur Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	70	2.787.995.800	3.193.449.789	70	2.787.995.800	4,96	138.236.300	16,03	447.001.379					20,99	585.237.679				
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya	100%	1.285.018.000	1.843.823.678	100%	1.285.018.000	9,73	125.055.000	31,73	407.677.879					41,46	532.732.879				



	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrator Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	200 Orang	1.285.018.000	151	1.843.823.678	200 Orang	1.285.018.000	29 Orang	125.055.000	382,00	407.677.879				411 Orang	532.732.879					
--	--	---	-----------	---------------	-----	---------------	-----------	---------------	----------	-------------	--------	-------------	--	--	--	-----------	-------------	--	--	--	--	--

13		<b>Sertifikasi, Keseimbangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Manajerial</b>	<b>100 %</b>	<b>1.502.977.800</b>		<b>1.349.626.111</b>	<b>100 %</b>	<b>1.502.977.800</b>	<b>0,88</b>	<b>13.181.300</b>	<b>2,62</b>	<b>39.323.500</b>				<b>3,49</b>	<b>52.504.800</b>				
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Asn yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	219 org	1.502.977.800	2	1.349.626.111	219 org	1.502.977.800	-	13.181.300	180 orang	39.323.500				180 Orang	52.504.800				
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,18</b>							<b>40,24 %</b>					
<b>Predikat kinerja</b>																						

<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program</b>		15.50 1.518. 746			15.50 1.518. 746		2.743 .140. 061		3.494 .802. 565					6.237 .942. 626					
<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja</b>																			
<b>Faktor penghambat keberhasilan kinerja</b>																			
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</b>																			
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya</b>																			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Anggaran Tahun berjalan s.d triwulan II 2024 sebesar Rp. 6.237.942.626,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.501.518.746,- atau 40,24% dengan realisasi fisik 100%. Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori capaian baik. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, merupakan komitmen dari seluruh komponen sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Banjarbaru.

Atas keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian dari pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mendorong keberhasilan sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong Keberhasilan :

1. Adanya Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk peningkatan pengembangan kompetensi.
2. Koordinasi hubungan kerja yang cukup sinergis
3. Tersedianya SDM yang cukup memadai
4. Pengelolaan Pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi
5. Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan

b. Faktor Penghambat :

1. Perubahan peraturan perundang – undangan serta kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan.
2. Dalam mengikut sertakan pegawai untuk diklat teknis dan fungsional, penyelenggaranya harus lembaga diklat yang terakreditasi dan waktu pelaksanaan dalam mengikuti jadwal dari pihak penyelenggara diklat yang terbatas.
3. Adanya pembatasan kuota peserta diklat yang tidak bersesuaian dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
4. Perubahan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang dinamis
5. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama masih kurangnya minat aparatur untuk mengikuti,
6. Masih kurangnya minat aparatur untuk mengikuti beasiswa tugas belajar
7. Minimnya alokasi formasi untuk CPNS dari kualifikasi tenaga teknis
8. Masih rendahnya kepatuhan PNS untuk membuat dan menyampaikan dokumen prestasi kerja, khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya dipatuhi namun sudah dimiliki.
9. pengawasan dan pembinaan secara berjenjang dari atasan langsung belum berjalan secara

optimal,SKPD cenderung masih menunggu pemberitahuan dari BKPP terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di unit kerjanya.

BKPSDM terus berusaha memperbaiki kinerjanya dengan terus melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sehingga meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi baik teknis/fungsional maupun Uji Kompetensi sehingga PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru semakin banyak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi baik bersifat daring maupun tatap muka, baik yang berbayar maupun melalui pola PNPB maupun gratis..
2. Mengikutsertakan calon peserta diklat yang berdasarkan analisis kebutuhan dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga diklat lain untuk mengikutsertakan calon peserta diklat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Memberikan informasi secara terbuka serta mengundang aparatur yang dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama
6. Melakukan assessment terhadap pejabat administrasi
7. Meningkatkan kualitas pelayanan tugas belajar
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi kementerian terkait alokasi formasi CPNS
9. Melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun dalam bentuk surat edaran terkait SKP kepada seluruh SKPD
10. Menerapkan system aplikasi berbasis elektronik yang langsung terintegrasi antara penginputan SKP dan kehadiran dengan pemberian pembayaran tunjangan tambahan penghasilan setiap bulannya
11. Mensosialisasikan dan penyampaian surat edaran terkait pelaksanaan tindakan disiplin dan pembinaan ASN.
12. Mensosialisasikan dan penyampaian surat edaran terkait kewajiban penyampaian LHKPN
13. Melakukan Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang evaluatif atas permasalahan dan kendala di masa sebelumnya, yang akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan, efisien sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan, serta efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk Rekapitulasi terkait Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, disajikan sebagaimana pada tabel 2.3

**TABEL 2.3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM KOTA BANJARBARU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	INDEKS SISTEM MERIT	335	292	265	265		270	-	
5.03.02.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	% DATA TERUPDATE PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
5.03.02.201.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 dok	-	50%
5.03.02.201.02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 dok	-	50%
5.03.02.201.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	137 dok	131 SK	146 Dok	174	100%	146 dokumen	65 SK	47,45
5.03.02.201.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	32 lembaga		32 Lembaga	32 Lembaga	100%	32 lembaga	32 lembaga	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
5.03.02.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Simstsem Informasi Kepegawaian	12 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	12 dok	6 dokumen	50,00
<b>5.03.02.202</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>% JABATAN LOWONG YANG TERISI SESUAI KETENTUAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
5.03.02.202.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						1 dokumen	-	-
5.03.02.202.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dok	500 SK	2 Dok	2 Dok	100%	6 dokumen	3 dokumen	50%
5.03.02.202.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 dok		10 Dok	10 Dok	100%	10 dokumen	5 dokumen	50%
<b>5.03.02.203</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>% APARATUR YANG SESUAI KOMPETENSINYA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
5.03.02.203.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60 Orang	30 Org	26 Org	26 org	100%	60 orang		50%
5.03.02.203.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	200 orang		100 Org	100 Orang	100%	50 orang	-	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
5.03.02.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Org	200 org	200 Org	200 Orang	100%	100 orang	-	50%
<b>5.03.02.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>% APARATUR YANG BERKINERJA BAIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
5.03.02.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 laporan		2 Lap	2 Lap	100%	2 laporan	-	-
5.03.02.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 orang		3 Org	3 org	100%	3 orang	-	-
5.03.02.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dokumen	-	-
5.03.02.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 orang	12 Dok	20 Org	20 org	100%	20 orang	12 Orang	60%
5.03.02.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	1 laporan	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
5.03.02.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 dokumen	-	-
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						100%			
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>% APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>	<b>62,87%</b>				<b>100%</b>	<b>31,59</b>		
5.04.02.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	% APARATUR YANG SESUAI KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	
5.04.02.201.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	250 org	238 org	231 org	324 Org	100%	250 orang	411 orang	205.5 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
5.04.02.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% APARATUR YANG SESUAI KOMPETENSI MANAJERIAL	100%		100%	100%	100%	100%	50%	87.38%
5.04.02.202.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	68 org	197 org	2 lap	2 Lap	100%	471 orang/ 5 Lap	180 orang	87.38%
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	A	BB	A	A	100%	A	A	A
x.xx.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
		<b>% PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	
x.xx.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	4 dok	7 Dok	7 Dok	100%	6 dokumen	3 dokumen	50%
x.xx.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	4 dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Laporan	-	-
<b>x.xx.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN SESUAI KETENTUAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	
x.xx.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 org	32 Org	532 Org	53 Org	100%	65 orang	65 orang	100%
x.xx.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
x.xx.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 laporan	6 laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	4 laporan	50%
5.03.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>PERSENTASE BMD YANG TERIDENTIFIKASI DAN TERVERIFIKASI</b>	100%		100%	100%	100%	100%	-	-
5,03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
x.xx.01.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM YANG DIFASILITASI</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
x.xx.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	121 Buah	3 Pekat	3 Pekat	100%	3 Paket	3 paket	50%
x.xx.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	7 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	5 Paket	8 paket	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
x.xx.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7484 Eks 5175 lbr	2 Peng	2 Peng	100%	2 Paket	2 paket	50%
x.xx.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	4138 Eks	4 Bacaan	4 Bacaan	100%	4 Dokumen	2 dok	50%
x.xx.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100 Lap	4 LeKo	4 LeKo	100%	4 Laporan	2 lap	50%
x.xx.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	100%		-	
<b>x.xx.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>CAKUPAN BARANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
x.xx.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
x.xx.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						6 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
x.xx.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	1 Paket			100%	5 unit	-	-
x.xx.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Paket	5 ueina	5 ueina	100%	5 unit	-	-
x.xx.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedunga kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	10 unit	-	10 Gedung	10 Gedung	100%		-	
x.xx.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	1 unit	1 unit	100%	10 unit	-	
<b>x.xx.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>CAKUPAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH YANG TERSEDIA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
x.xx.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 Jenis	12 Sumber	12 Sumber	100%	12 laporan	6 lap	50%
x.xx.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Orang	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 laporan	2 lap	50%

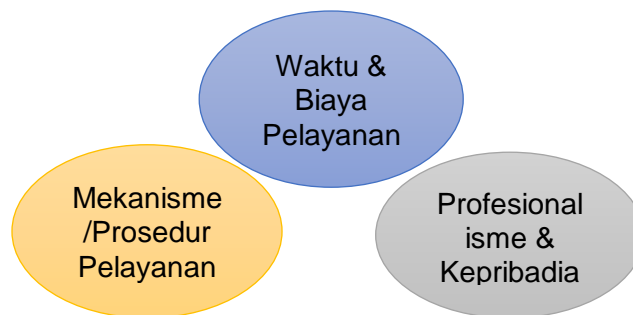
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
x.xx.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	CAKUPAN BARANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONDISI BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
x.xx.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	2 unit	100%
x.xx.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	17 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	18 unit	100%
x.xx.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2 Paket	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	-	-
x.xx.01.209.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	-			100%	1 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11
x.xx.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4 Paket	1 Unit	1 unit	100%	1 Unit	-	50%
x.xx.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	-	-
x.xx.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	1 Paket	54 Unit	54 Unit	100%	54 Unit	-	50%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat / pegawai, melalui Sasaran ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat / pegawai atas pelayanan yang telah diberikan BKPSDM. Unsur – unsur pelayanan yang diukur terdiri dari 3 hal yaitu :



Penilaian pelayanan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat dalam hal ini lebih ke Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru dan mendapatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di tahun 2023 adalah 93,17. Artinya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru dikategorikan sangat baik.



## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

### 2.3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya aparatur sipil Negara sesuai dengan kebutuhan formasi. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang PNS, dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya. Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good governance*. Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (PANSEL JPT).
- b. Masih adanya aparatur sipil Negara yang melanggar aturan-aturan kepegawaian yang berlaku.
- c. Belum maksimalnya pemberian hak-hak kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang berprestasi.
- d. Masih adanya pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.
- e. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, PNS dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur (PNS) yang profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami tugas dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme PNS masih belum dapat diwujudkan.
- f. Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), yang dimana masih perlu di integrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian seperti, Kenaikan Gaji

Berkala, Kenaikan Pangkat, Penentuan batas usia pensiun, dan administrasi kepegawaian lainnya. Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai.

### **2.3.2 Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun kebijakan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

#### **Kepala Badan mempunyai Tugas:**

- a. Merumuskan program kerja BKPPD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja BKPPD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar kegiatan berjalan sesuai rencana;
- c. Membina administrasi dan aparatur di lingkungan pemerintah daerah secara berkala guna meningkatkan kualitasnya;
- d. Mengarahkan penyusunan strategi dan kebijakan Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi agar kebijakan tepat sasaran;
- e. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja (PK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan Badan berdasarkan ketentuan yang ada agar tercipta tertib ketatausahaan; pengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan aparatur, pembinaan aparatur, mutasi aparatur dan pengembangan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di lingkungan Badan dalam optimalisasi sumber daya yang ada;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kontrol akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- i. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat mempunyai fungsi**

- a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pembinaan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- b. Pengendalian, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan pegawai ASN, penyusunan informasi kepegawaian, pemrosesan status dan kedudukan hukum kepegawaian, pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan fasilitasi profesi ASN
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan program di bidang mutasi dan pengembangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- b. Pengendalian, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, pengembangan karier dan promosi pegawai, serta pengembangan kompetensi pegawai
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:**

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berdasarkan RKPD Pemerintah Kota Banjarbaru sifatnya sebagai pendukung yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Pada Renja Perubahan SKPD Tahun 2024 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai Renstra Badan Kepegawaian daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang mana memuat (tiga) Program yaitu Program Kepegawaian, Program Pengembangan SDM dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan 13 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus memadukan antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program kegiatan SKPD.

Pada Pelaksanaan Musrembang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023 tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru.

Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 24
<b>BADAN KEPEGAWIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			15.501.518.746				18.267.447.425
<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>16.292.704.963</b>	<b>5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	
5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 DOK	29.453.250	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 DOK	37.470.250
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 LAP	189.153.750	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 LAP	204.753.750
<b>5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	55 ORANG	5.643.243.916	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	65 ORANG	6.511.438.535
5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	9.768.750	5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	9.768.750

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 LAPORAN	18.117.000	5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 LAPORAN	18.117.000
<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	
5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 LAPORAN	28.143.400	5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 LAPORAN	15.000.000
<b>5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 PAKET	35.823.000	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 PAKET	35.823.000
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 PAKET	255.900.000	5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 PAKET	260.700.000
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 PAKET	65.441.600	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 PAKET	65.441.600
<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 DOKUMEN	1.998.000	5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 DOKUMEN	1.998.000
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	4 LAPORAN	500.000.000	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	4 LAPORAN	755.192.000
<b>5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan</b>	<b>100%</b>	
5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 UNIT	186.480.000
5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	2 UNIT	62.456.800	5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	2 UNIT	147.102.000
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 UNIT	77.515.900	5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 UNIT	90.262.000
5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 UNIT	68.936.480	5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 UNIT	295.651.440
<b>5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	



URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 LAPORAN	15.000.000	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 LAPORAN	15.000.000
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 LAPORAN	153.262.800	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 LAPORAN	163.962.800
<b>5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	
5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 UNIT	76.000.000	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 UNIT	76.000.000
5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 UNIT	113.400.000	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 UNIT	113.400.000
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 UNIT	4.000.000	5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 UNIT	4.000.000
5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 UNIT	40.000000	5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3 UNIT	40.000000

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 UNIT	119.180.000
5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 UNIT	18.000.000	5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 UNIT	18.000.000
<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			
<b>5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase data terupdate pada sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase data terupdate pada sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik</b>	<b>100%</b>	
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	82.835.200	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dok	82.835.200
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	681.754.750	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	681.754.750
5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	146 Dok	107.801.000	5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	130 Dok	107.801.000
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	32 lembaga	407.399.100	5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	32 lembaga	425.039.100

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	201.199.500	5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	183.559.500
<b>5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase jabatan lowong yang terisi sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase jabatan lowong yang terisi sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dok	60.000.000
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dok	259.587.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dok	321.087.000
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	10 Dok	2.237.415.700	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	10 Dok	2.645.520.750
<b>5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase aparatur sesuai kompetensinya</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase aparatur sesuai kompetensinya</b>	<b>100%</b>	
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60 Org	740.520.400	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60 Org	740.520.400
5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100 Org	44.698.000	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50 Org	44.598.000
5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	100 Org	60.599.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	100 Org	60.599.000
<b>5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>		<b>5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>	

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 lap	224.699.800	5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 lap	224.699.800
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	3 org	59.99.800	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	3 org	59.99.800
5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 dok	73.798.750	5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 dok	73.798.750
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	20 org	70.000.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	20 org	70.000.000
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 LAPORAN	45.600.000	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 LAPORAN	47.400.000
5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 dok	9.999.600	5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 dok	9.999.600

URAIAN	KINERJA	TARGET	MURNI 2024	URAIAN	KINERJA	TARGET	PERUBAHAN 2024
<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
<b>5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi teknis dan fungsional</b>	<b>100%</b>		<b>5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi teknis dan fungsional</b>	<b>100%</b>	
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200 Org	1.285.018.000	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200 Org	1.285.018.000
<b>5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi manajerial</b>	<b>100%</b>		<b>5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi manajerial</b>	<b>100%</b>	
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Lap	1.502.977.550	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Lap	1.502.977.550

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarbaru

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Perubahan RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan arah bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru dalam menentukan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yaitu “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”, yang selaras dengan Sasaran ke 1 (satu) pada RPJMD Kota Banjarbaru. Indikator dari tujuan tersebut adalah “Indeks Profesionalitas ASN” yang juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan Indeks Reformasi Birokrasi baik pada Pemerintah Daerah maupun Pusat, dalam mendukung Program Nasional Pemerintah atau RPJMN dengan tujuannya “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bedaya Saing “.

Program kerja yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas fungsinya adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan SDM, dengan sasaran Program masing-masing yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN dan Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dengan melaksanakan sasaran kebijakan beserta program-program diatas dapat mewujudkan ASN yang Profesional pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### **4.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD, yang sesuai dengan tugas fungsi SKPD sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh SKPD dalam memenuhi visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur dengan jelas.

Sesuai dengan Renja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru mempunyai tujuan dan sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2

Tabel 4.2  
TUJUAN DAN SASARAN (Perubahan) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANJARBARU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN	72	73	74	75	76	77
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	292	250	260	270	275	280
		Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru	Persentase SDM Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	15,8	32,32	51,92	83,65	69,45	94,33

### 4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### 1. Program

Rincian Kebijakan dalam bentuk program kerja operasional merupakan proses penentu jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana yang telah ditetapkan, adapun program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2024 sejumlah 3 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi program kerja operasional diimplementasikan dalam kegiatan/aktifitas SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan di usulkan sejumlah 13 ( tiga belas ) Kegiatan dan 34 ( tiga puluh empat ) sub kegiatan sebagai berikut :

##### Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **Bagian Perencanaan dan Keuangan**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

#### **Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian**

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabata Pelaksanaan Pengadaan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

- Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja paratur
    - Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
    - Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
    - Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
    - Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

#### **Bidang Mutasi Kepangkatan dan Promosi**

1. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

#### **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
3. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA**

### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan dua program utama dan satu program rutin SKPD, Total dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan perubahan ini adalah sebesar Rp. 18.247.414.125,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru disajikan sebagaimana pada tabel 5.1

**TABEL 5.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SOPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR HASIL KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET	2024	TARGET	2025
5.03	KEPEGAWAIAN									
01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	A		A	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%		100%	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	37.470.250	6 dok	30.956.250
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lap	189.153.750	2 lap	188.659.300
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%		100%	

5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 org/bln	6.511.438.535	65 org/bln	6.371.708.663
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	9.768.750	1 lap	10.308.550
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	8 lap	18.117.000	8 lap	17.718.850
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi</b>	<b>Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 lap	15.000.000	1 lap	13.250.000
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	35.823.000	3 paket	35.823.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	260.700.000	5 paket	205.368.500
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	65.441.600	2 paket	65.441.600

5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dok	1.998.000	4 dok	2.297.700
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 lap	123.590.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	755.192.000	4 lap	927.814.000
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	6 Unit	186.480.000	-	-
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	147.102.000	2 unit	37.248.000
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	90.626.000	5 unit	58.034.000
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 unit	295.651.440	5 unit	48.332.000
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	15.000.000	12 lap	14.880.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	163.962.800	4 lap	163.062.800

<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	76.000.000	1 unit	42.850.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	113.400.000	16 unit	146.510.000
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	4.000.000	8 unit	4.000.000
5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	119.180.000	-	-
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18.000.000	18 unit	17.850.000
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>INDEKS SISTEM MERIT</b>	<b>275</b>		<b>280</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					<b>Persentase data terupdate pada sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	

5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dok	82.835.400	2 dok	82.835.200
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	681.755.000	1 dok	681.754.750
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	146 dok	107.801.050	150 dok	107.801.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	32 Lembaga	425.039.100	32 Lembaga	407.399.100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	183.559.500	4 Dok	201.199.500
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>					<b>Persentase jabatan lowong yang terisi sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN				Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dok	60.000.000	3 Dok	183.336.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 DOK	321.087.000	2 Dok	239.587.000
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN				Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Dok	2.645.520.750	7 Dok	2.133.801.050
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					<b>Persentase aparatur sesuai kompetensinya</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	



5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	61 Orang	740.520.500	11 orang	740.520.400
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN			13 orang	44.017.900
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	50 orn	44.698.000	50 orang	44.698.000
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 orang	60.599.000	200 orang	60.599.000
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 lap	244.699.800	2 lap	169.354.500
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	3 org	59.999.800	4 org	78.197.000
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 dok	73.798.750	1 dok	66.348.000
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	20 org	70.000.000	20 org	80.715.500
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1lap	47.400.000	1lap	74.809.000
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1 dok	9.999.600	1 dok	14.187.000
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									

01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH									
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					% ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	69,45		75	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					Persentase aparatur yang sesuai kompetensi teknis dan fungsional	100%		100%	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	236 org	1.720.018.000	286 org	1.241.000.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					Persentase aparatur yang sesuai kompetensi manajerial	100%		100%	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Prajabatan	5 Lap	1.502.977.550	3 lap	1.075.141.550
	JUMLAH							18.247.414.125		16.292.704.963

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2024**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru**

No	Sub Kegiatan	Uraian/Periha Penambahan	Pagu Murni	Pagu Penambahan	Total	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penambahan Kekurangan pada honor Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 bulan	189.153.750	15.600.000	204.753.750	Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perjadis Bimtek Penyusunan Renstra SKPD 2025-2045 Kota Malang - 4 Hari 3 Malam	29.453.250	8.017.000	37.470.250	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penambahan 5 Orang PNS pada BKPSDM	5.643.243.916	859.637.012	6.502.880.928	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	karena adanya tambahan pegawai di BKPSDM Banjarbaru sehingga terjadi kekurangan untuk makan minum harian pegawai (8 Orang)	255.900.000	4.800.000	260.700.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masih diperlukan koordinasi dan Konsultasi kepegawaian hingga akhir tahun 2024	500.000.000	255.192.000	755.192.000	
6	Pengadaan Mebel	Untuk meningkatkan layanan kepegawaian, penambahan lemari asrip untuk bidang baru. Karena keterbatasan tempat pelayanan maka akan dibuat meja pelayanan	62.456.800	86.265.200	148.722.000	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Untuk meningkatkan layanan kehumasan dan penyebaran Informasi Kegiatan BKPSDM Banjarbaru	68.936.480	228.023.280	296.959.760	
		Untuk meningkatkan failitas layanan kepegawaian di BKPSDM Banjarbaru dengan konsep modern dan humanis				
		untuk memperbaharui Sound system dan layanan informasi di BKPSDM Banjarbaru				
		sebagai sarana penunjang informasi dan Diklat				
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pejabat Pengadaan 10 OB	152.262.800	10.700.000	163.962.800	

No	Sub Kegiatan	Uraian/Periha Penambahan	Pagu Murni	Pagu Penambahan	Total	Keterangan
		Penganggaran Honor Srikandi 2024(2 orang/skpd) untuk 3 Bulan @150.000 untuk semua skpd				Penambahan honorarium tim sesuai SK Wali Kota Banjarbaru
		Administrator LAPOR 10 OB				
		Administrator / Operator SP-PPID 10 OB				
9.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penambahan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (6 Unit)		186.480.000	186.480.000	Sub Keg Baru
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	diperlukan perbaikan karena dan kebocoran dari toilet/WC aula gawi pada ruangan bidang Bidang Pengadaan, Pembinaan Dan Informasi Kepegawaian		120.000.000	120.000.000	Sub Keg Baru
11.	Pengelolaan Mutasi ASN	usulan Sub Kegiatan Baru karena adanya perubahan nomenklatur pada BKPSDM tahun 2024		60.000.000	60.000.000	Sub Keg Baru
12.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Pemeliharaan aplikasi SIAPAJA (untuk kenaikan pangkat), penambahan kekurangan pada honor tim sebanyak 2 bulan, dan penambahan makanan dan minuman untuk acara keg workshop kenaikan pangkat	259.587.000	61.500.000	321.087.000	
13.	Pengelolaan Promosi ASN	penambahan untuk kegiatan penempatan ASN, Kegiatan TPK PNS, Kegiatan Seleksi Terbuka JPT dan Kegiatan Seleksi SEKDA	2.237.415.700	408.105.200	2.645.520.900	
14.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Penambahan anggaran dan rekening belanja baru dikarenakan adanya penanganan kasus peradilan PNS di PTUN yang sudah berproses di bulan Maret sampai dengan sekarang (proses Banding) 1 orang	45.600.000	1.800.000	47.400.000	
15.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Penambahan anggaran Penyelenggaraan Diklat Renstra 100 orang dan Pelatihan Sosial Kulturan Pengetahuan Keagamaan 36 orang	1.285.018.000	435.000.000	1.720.018.000	Dari Bapperida Kota Banjarbaru Biaya Kontribusi Diklat Renstra untuk 50 Orang @ Rp.6.000.000,- ke Malang

No	Sub Kegiatan	Uraian/Periha Penambahan	Pagu Murni	Pagu Penambahan	Total	Keterangan
			10.807.543.596	2.741.119.692	13.559.363.288	

**Tabel 5.3**  
**Pergeseran Pagu Anggaran Tahun 2024**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru**

<b>Kode</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Sesudah Perubahan</b>	<b>Jumlah perubahan (-/+)</b>	<b>Keterangan</b>
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Lapoan Barang Milik Daerah Pada SKPD	28.143.400	15.000.000	(13.143.400)	- pergeseran pada belanja Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Anggaran Rp. 13.143.400 dialokasikan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	77.515.900	90.659.300	13.143.400	- penambahan pada Belanja Modal Personal Komputer dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Tambahan Anggaran Rp. 13.143.400 dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	407.399.100	425.039.100	17.640.000	- Penambahan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-perabot kantor, dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Tambahan Anggaran Rp. 17.640.000 dari Sub Keg Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	201.199.500	183.559.500	(17.640.000)	- pergeseran pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Anggaran Rp.17.640.000 dialokasikan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		<b>714.257.900</b>	<b>714.257.900</b>	-	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banjarbaru pada tahun 2025. Namun hal ini tentunya tidak tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur BKPSDM Kota Banjarbaru. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan sangat ditentukan peran, tanggungjawab, serta kinerja dari seluruh jajaran Pegawai BKPSDM Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai implementasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 yang mana terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp. 18.247.414.125,-

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan agar tercapai kinerja BKPSDM Kota Banjarbaru sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang handal, koordinatif, inovatif dan implementatif dalam mendukung terwujudnya ASN Kota Banjarbaru yang sejahtera, unggul dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Banjarbaru, 19 September 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BANJARBARU

Dr. H. GUSTAFA YANDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1004

# LAMPIRAN



WE  
SERVE  
WITH  
HEART

**BKPSDM**  
Banjarbaru



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPDTAHUN 2024  
KOTA BANJARBARU

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024											Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Keg
				Kelompok sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator		Suber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Berubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>																
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	A	A								
		CAKUPAN PELAYANAN INTERNAL YANG DIFASILITASI	CAKUPAN PELAYANAN INTERNAL YANG DIFASILITASI	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %								
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %	218.607.000	242.224.000	23.617.000			100 %	219.615.550	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	7 dok	7 dok	29.453.350	37.470.250	8.017.000	PKB	PAD	6 dok	30.659.300	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	Seluruh Pegawai dilingkup	Seluruh Pegawai dilingkup	Kota Bjb	Kota Bjb	3 lap	3 lap	189.153.750	204.753.750	15.800.000	PAD	PAD	2 lap	188.659.300	

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	BKPSDM												
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %	5.842.329.666	6.539.324.285	896.994.819	PAD	PAD	100 %	6.399.736.063	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	55 org/ bln	61 org/ bln	5.614.443.916	8.511.438.535	896.994.619	PAD	PAD	65 org/ bln	6.371.708.663	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	1 lap	1 lap	9.768.750	9.768.750	-	PKB	OKB	1 lap	10.308.550	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	8 lap	8 lap	18.117.000	18.117.000	-	PKB	PAD	8 lap	17.718.850	

5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %	28.143.400	15.000.000	(13.143.400 )	PAD	PKB	5 lap	14.798.000	
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	5 lap	5 lap	28.143.400	15.000.000	(13.143.400 )	PAD	PKB	5 lap	14.798.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %	859.162.700	1.119.154.700	259.992.000	PAD	PAD	100 %	930.651.100	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	3 paket	3 paket	35.823.000	35.823.000	-	PKB	PAD	3 paket	35.823.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	8 paket	8 paket	255.900.000	260.700.000	4.800.000	PKB	PAD	5 paket	203.820.500	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	2 paket	2 paket	65.441.700	65.441.700	-	PKB	PKB	2 paket	65.441.600	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	4 dok	4 dok	1.998.000	1.998.000	-	PKB	PKB	2 paket	1.998.000	

5.03.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	4 lap	4 lap	500.000.000	755.192.000	255.192.000	PKB	PAD	4 lap	499.978.000	
5.03.01 .2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan</b>	<b>Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Kot a Bjb</b>	<b>Kot a Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>208.909.180</b>	<b>719.859.440</b>	<b>510.950.260</b>			<b>100 %</b>	<b>143.614.000</b>	
5.03.0 1.2.07. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah unit kendaraan dinas operasional tau lapangan yang disediakan	-	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	-	Kota Bjb	-	6 unit	-	186.480.000	186.480.000	-	PAD	-	-	
5.03.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	5 unit	11 unit	62.456.800	147.102.000	84.645.200	PKB	PAD	2 unit	37.248.000	
5.03.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	5 unit	7 unit	77.515.900	90.626.000	13.110.100	PKB	PAD	5 unit	58.034.000	
5.03.0 1.2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	10 unit	17 unit	66.936.480	295.651.440	226.714.980	PKB	PAD	18 unit	48.332.000	
<b>5.03.0 1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Kot a Bjb</b>	<b>Kot a Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>168.262.800</b>	<b>178.962.800</b>	<b>10.700.000</b>			<b>100 %</b>	<b>177.942.800</b>	
5.03.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	12 lap	12 lap	15.000.000	15.000.000	-	PAD	PKB	100 %	14.880.000	

		Listrik yang Disediakan	Listrik yang Disediakan														
5.03.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	4 lap	4 lap	153.262.800	163.962.800	10.700.000	PKB	PKB	4 lap	163.062.800	
<b>5.03.0 1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>251.400.000</b>	<b>370.580.000</b>	<b>119.180.000</b>			<b>100 %</b>	<b>251.210.000</b>	
5.03.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	2 unit	2 unit	76.000.000	76.000.000	-	PAD	PAD	1 unit	75.985.000	
5.03.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	18 unit	16 unit	113.400.000	113.400.000	-	PKB	PAD	16 unit	113.375.000	
5.03.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	20 unit	8 unit	4.000.000	4.000.000	-	PKB	PAD	8 unit	4.000.000	
5.03.0 1.2.09. 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	1 unit	2 unit	40.000.000	40.000.000	-	PKB	PAD	3 unit	40.000.000	

5.03.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	-	Kota Bjb	-	1 unit	-	119.180.000	119.180.000	-	PAD	-	-	
5.03.0 1.2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM	Kota Bjb	Kota Bjb	54 Unit	18 unit	18.000.000	18.000.000	-	PKB	PKB			
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>INDEKS SISTEM MERIT</b>	<b>INDEKS SISTEM MERIT</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>5.307.906.200</b>	<b>5.839.313.250</b>	<b>531.405.050</b>			<b>275</b>	<b>5.411.159.900</b>	
5.03.02 .2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase data terupdate pada sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik</b>	<b>Persentase data terupdate pada sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.480.990.050</b>	<b>1.480.990.050</b>	<b>-</b>			<b>100 %</b>	<b>1.180.989.050</b>	
5.03.02 .2.01.0 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	2 dok	2 dok	82.835.400	82.835.400	-	PAD	PAD	2 dok	82.835.200	
5.03.02 .2.01.0 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	1 dok	1 dok	681.755.000	681.755.000	-	PAD	PAD	1 dok	681.754.750	

5.03.02 .2.01.0 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	146 dok	146 dok	107.801.050	107.801.050	-	PAD	PAD	150 dok	107.801.000	
5.03.02 .2.01.0 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	32 lembaga	32 lembaga	407.399.100	425.039.100	17.640.000	PAD	PAD	32 lembaga	407.399.100	
5.03.02 .2.01.1 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	12 dok	12 dok	201.199.500	183.559.500	(17.640.000)	PAD	PAD	4 dok	201.199.500	
<b>5.03.02 .2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase jabatan lowong yang terisi sesuai ketentuan</b>	<b>Persentase jabatan lowong yang terisi sesuai ketentuan</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2.497.002.700</b>	<b>3.026.607.750</b>	<b>529.605.050</b>			<b>100 %</b>	<b>2.556.724.050</b>	
5.03.02 .2.02.0 1	Pengelolaan Mutasi ASN	-	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	-	Kota Bjb	-	1 dok	-	60.000.000	60.000.000	-	PAD	3 dok	183.336.000	
5.03.02 .2.02.0 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	6 dok	6 dok	259.587.000	320.087.000	61.500.000	PAD	PAD	2 dok	239.587.000	
5.03.02 .2.02.0 3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	10 dok	10 dok	2.237.415.700	2.645.520.750	408.105.050	PAD	PAD	7 dok	2.113.801.050	

5.03.02 .2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase aparatur sesuai kompetensinya	Persentase aparatur sesuai kompetensinya	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %	845.817.500	845.817.500	-			100 %	889.835.300	
5.03.02 .2.03.0 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	60 org	61 org	740.520.500	740.520.500	-	PAD	PAD	11 org	740.520.400	
5.03.02 .2.03.1 3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	100 org	50 org	44.698.000	44.698.000	-	PAD	PAD	50 org	44.698.000	
5.03.02 .2.03.1 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	200 org	200 org	60.599.000	60.599.000	-	PAD	PAD	100 org	60.599.000	
5.03.02 .2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	100 %	100 %	484.197.950	485.897.950	1.800.000			100 %	483.611.000	
5.03.02 .2.04.0 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	2 lap	2 lap	224.699.800	224.699.800	-	PAD	PAD	3 lap	169.354.500	
5.03.02 .2.04.0 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	3 org	3 org	59.999.800	59.999.800	-	PAD	PAD	4 org	78.197.000	
5.03.02 .2.04.0 6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	1 dok	1 dok	73.798.750	73.798.750	-	PAD	PAD	1 dok	66.348.000	



		Tanda Jasa Aparatur	Tanda Jasa Aparatur														
5.03.02 .2.04.0 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	20 org	20 org	70.000.000	70.000.000	-	PAD	PAD	25 org	80.715.000	
5.03.02 .2.04.0 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	4 lap	4 lap	47.400.000	47.400.000	-	PAD	PAD	1 lap	74.809.000	
5.03.02 .2.04.0 9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	1 dok	1 dok	9.999.600	9.999.600	-	PAD	PAD	1 dok	14.187.000	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>% ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>	<b>% ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>68,8 1%</b>	<b>83,6 5%</b>	<b>2.787.995.800</b>	<b>3.222.995.650</b>	<b>434.999.850</b>			<b>69,4 5%</b>	<b>2.743.977.550</b>	
<b>5.04.02 .2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi teknis dan fungsional</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi teknis dan fungsional</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.285.018.000</b>	<b>1.720.018.000</b>	<b>435.000.000</b>			<b>200 org</b>	<b>1.241.000.000</b>	
5.04.02 .2.01.0 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	150 org	236 org	1.285.018.000	1.720.018.000	435.000.000	PAD	PAD	200 org	1.241.000.000	

	Umum																
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi manajerial</b>	<b>Persentase aparatur yang sesuai kompetensi manajerial</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>Kota Bjb</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.502.977.800</b>	<b>1.502.977.650</b>	<b>(150)</b>	<b>PAD</b>	<b>PAD</b>	<b>3 lap</b>	<b>1.502.977.550</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Prajabatan	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Seluruh Pegawai dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	Kota Bjb	Kota Bjb	5 lap	5 lap	1.502.977.800	1.502.977.650	(150)	PAD	PAD	3 lap	1.502.977.550	